

KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Ferica Christinawati Putri¹⁾

¹⁾Jurusan Akuntansi dan Universitas Borneo Tarakan

fericacputri@borneo.ac.id

ABSTRACT

Since the implementation of the accrual-based government accounting system, accountability in the form of accountability and transparency on financial performance has become something that every government in Indonesia continues to strive for. Local Government Financial Reports (LKPD) as a form of accountability and transparency do not yet contain informative financial reports for all users of financial information. The purpose of this study is to interpret the LKPD of the Central Java Provincial Government from 2018-2020 using three dimensions of financial performance consisting of: 1) Short-Term Solvency, 2) Financial Independence and 3) Financial Flexibility. This research is a descriptive quantitative study with secondary data sources derived from the Budget Realization Report (LRA) of the Central Java Provincial Government. This research is a descriptive analysis based on secondary data processing sourced from the 2018-2020 Central Java Provincial Government Budget Realization Report. The results of research on Short-Term Solvency consisting of Cash Ratios, Quick Ratios and Current Ratios show that the government has the ability to meet its short-term obligations within twelve months, the Financial Independence Ratio shows that the value of independence is low so that the Central Java Provincial government needs to optimize new funding sources from regions, and the Flexibility Ratio shows a decreasing trend every year, which means that the level of financial flexibility to carry out operational activities is relatively low.

Keywords: *Short-Term Solvency, Financial Independence, Financial Flexibility*

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual, pertanggungjawaban berupa akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan menjadi hal yang terus diperjuangkan oleh setiap pemerintahan di Indonesia. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi belum berisikan laporan keuangan yang informatif bagi seluruh pengguna informasi keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan interpretasi terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018-2020 dengan menggunakan tiga dimensi kinerja keuangan yang terdiri dari: 1) Solvabilitas Jangka Pendek, 2)Kemandirian Keuangan dan 3)Fleksibilitas Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif berdasarkan pengolahan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020. Hasil penelitian terhadap Solvabilitas Jangka Pendek terdiri Rasio Kas, Rasio Cepat dan Rasio Lancar menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam tempo dua belas bulan, Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan bahwa nilai kemandirian yang rendah sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengoptimalkan sumber pendanaan baru dari daerah, dan Rasio Fleksibilitas menunjukkan tren penurunan setiap tahun yang artinya tingkat fleksibilitas keuangan untuk menjalankan kegiatan operasional tergolong rendah.

Kata kunci: *Solvabilitas Jangka Pendek, Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan*

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015, sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia telah berbasis akrual. Tujuan dari implementasi berbasis akrual yaitu untuk transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas atas proses dari awal hingga akhir atas penggunaan uang rakyat (Erniati, 2019). Akuntabilitas publik ini telah menjadi kewajiban bagi para pemegang amanah dari rakyat untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemberi Amanah baik itu pemimpin daerah dan rakyat yang memiliki hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Sari, Asaari, & Hidayah, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa proses akuntansi terdiri dari proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Pemerintah daerah telah melakukan proses akuntansi tersebut namun LKPD belum optimal digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para penyelenggara pemerintahan daerah (Suhartanto, 2013). Hal ini disebabkan oleh kualitas LKPD yang tidak informatif dan pengaruh paradigma politik yang sangat erat, sehingga menyebabkan LKPD belum memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dipahami (Suhartanto, 2013).

Sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan dana APBD yang harus transparan, efektif, efisien dan akuntabel agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Machmud, Kawung, & Rompas, 2014). Namun, tidak semua pengguna laporan keuangan memiliki kemampuan analisis keuangan dengan baik, sehingga dibutuhkan analisis kinerja keuangan pemerintah agar laporan keuangan tersebut dapat diandalkan untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mengukur ketercapaian pengelolaan keuangan yang telah diamanahkan oleh rakyat.

Kondisi keuangan dalam konteks *fiscal health* merupakan kondisi kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan dan layanan kepada masyarakat (Hendrik, 2004). Dalam Zafra, Gomez dkk. (2009) disebutkan bahwa kondisi keuangan dalam konteks *financial health* yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh hutang serta menyediakan layanan pada tingkat yang diterima oleh masyarakat sekitar. *Governmental Accounting Standard Boar* menyebutkan kondisi keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan serta

memenuhi kewajiban jangka berikutnya (GASB, 1987).

Sehingga, kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan kondisi kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan hak-hak keuangan serta memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu dan mempertahankan kualitas pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam Ritonga dkk (2012,2012b) menyebutkan bahwa kondisi keuangan yang sehat dapat terjadi jika pemerintah daerah mampu menjalankan hak-hak keuangan dan kewajiban keuangan serta mampu memenuhi semua kewajiban keuangan tersebut dalam rangka tercapainya tujuan negara.

Penilaian kondisi keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap realisasinya. Analisis rasio keuangan pada penelitian ini menggunakan beberapa indikator pada Sistem Pemantauan Tren Keuangan (STPK). STPK merupakan model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada *Financial Trends Monitoring System (FTMS)* yang dikembangkan oleh *International City/County Management Association (ICMA)*, yang terdiri dari 3 dimensi dan 15 indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah (Ritonga, 2014).

2. TINJAUAN PUSTAKA

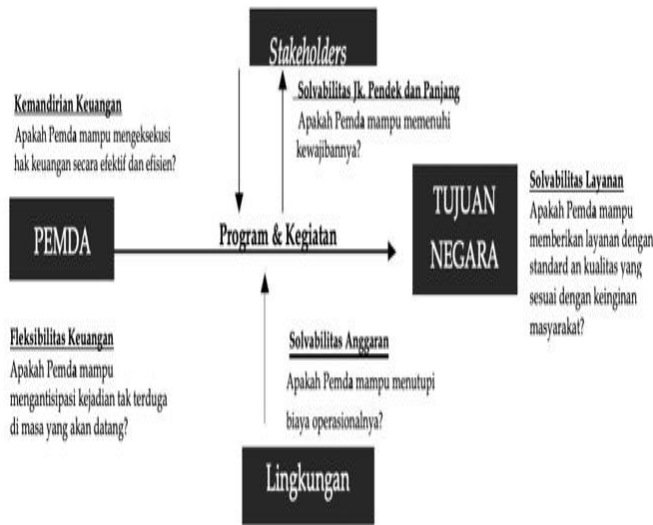
1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menyatakan bahwa perilaku dan sikap seorang yang akan menempatkan kepentingan jangka Panjang kelompok di atas tujuan pribadi untuk melayani kepentingan pribadi seseorang (Muth & Donaldson, 1998). Menurut teori *stewardship*, para manajer selalu bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan optimalisasi utilitas kelompok *principal* serta manajemen. Teori ini memandang manajemen sebagai tulang punggung dari keberhasilan organisasi. Teori ini menemukan bahwa kesuksesan organisasi dapat tercapai bila organisasi bekerja secara efektif dan efisien sehingga akan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan dan pengelola organisasi (Muth & Donaldson, 1998).

2. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Kondisi keuangan Pemerintahan Daerah merupakan kondisi kemampuan keuangan pemda untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien (Ritonga, 2014), yang diukur dalam tiga dimensi sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Konseptualisasi Kondisi Keuangan Pemda



Sumber: Ritonga, 2014

a. Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban lancar yang jatuh tempo dalam waktu 30 hingga 60 hari (Ritonga, 2014). Indikator ini dihitung dengan menggunakan beberapa rasio berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek} + \text{Piutang}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

Rasio solvabilitas jangka pendek pada pemerintah daerah menginterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai solvabilitas jangka pendek maka nilai aktiva lancar lebih tinggi daripada kewajiban lancarnya. Nilai solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan dua belas bulan.

b. Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan ini berada dalam dimensi basis pendapatan (Ritonga, 2014).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan suatu kondisi pemerintahan yang tidak membutuhkan sumber pendapatan di luar kendalinya. Semakin besar nilai rasio kemandirian keuangan

diinterpretasikan bahwa semakin besar komposisi pendapatan asli daerah dalam mendanai kegiatan pemerintah daerah.

c. Fleksibilitas Keuangan

Rasio fleksibilitas keuangan menunjukkan kelenturan sumber daya keuangan daerah untuk melaksanakan operasional (Ritonga, 2014).

$$\text{Fleksibilitas Keuangan} = \frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Belanja Operasi}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Semakin tinggi nilai rasio fleksibilitas keuangan maka semakin baik pemerintah menghadapi peristiwa luar biasa baik yang berasal dan internal maupun eksternal organisasi pemerintah daerah.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat beberapa komponen dalam suatu laporan keuangan pokok, diantaranya:

Laporan Realisasi Anggaran yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat maupun daerah untuk menunjukkan ketaatan terhadap amanah dalam APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan rencana sumber pendanaan, realisasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan Permendagri No. 77/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dalam Laporan Realisasi Anggaran, berikut adalah komponen yang ada dalam LRA:

a. Pendapatan

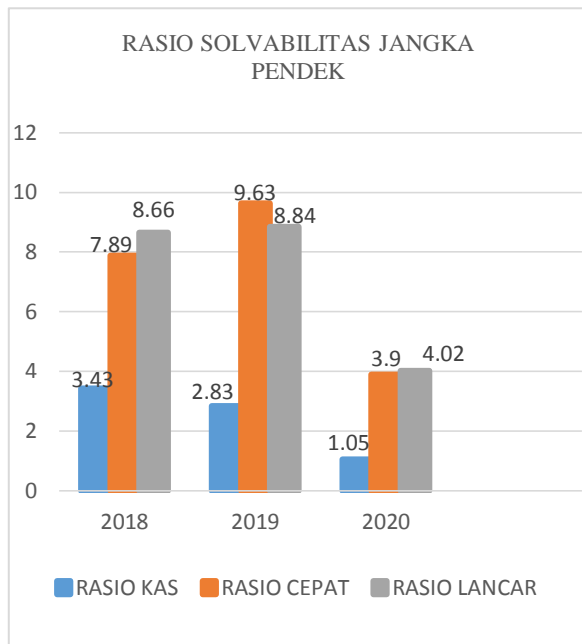
Pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan yang menambah ekuitas dalam satu periode tahun anggaran. Pendapatan merupakan hak Pemerintah Daerah sehingga tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu semua penerimaan yang berasal dari sumber kekayaan ekonomi asli daerah. PAD terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah.
- 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat yang sah

b. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam

periode satu tahun anggaran serta tidak akan memperoleh kembali pembayarannya oleh



Pemerintah Daerah. Belanja terdiri dari 3 hal, yaitu:

- 1) Belanja Operasi yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
- 2) Belanja Modal yang terdiri dari: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.
- 3) Belanja Tak Terduga.
- 4) Belanja Transfer yang terdiri dari: Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dan Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota.

c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah terutama yang dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

termasuk dalam kegiatan pembiayaan ini. Pembiayaan dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari: Penggunaan SILPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya
- 2) Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembayaran Pinjaman, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.
- 3)

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang melakukan perhitungan terhadap informasi keuangan untuk memecahkan permasalahan. Rasio keuangan pada penelitian ini menggunakan beberapa indikator dalam STPK yang terdiri dari Rasio Kas, Rasio Cepat, Rasio Lancar, Rasio Kemandirian, dan Fleksibilitas Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020. Indikator pada Sistem Pemantauan Tren Keuangan yang dikonsepsikan oleh Ritonga (2014). Sumber data berasal dari Laporan realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2018-2020.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Solvabilitas Jangka Pendek

Berdasarkan perhitungan rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada laporan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020 tergambar pada Gambar 2.

Gambar 2. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

Sumber: data diolah, 2022

Pada analisis rasio solvabilitas jangka pendek dengan menggunakan Rasio Kas, Rasio Cepat dan Rasio Lancar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tergolong mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya yang berada dalam masa pelunasan selama kurun waktu 12 bulan. Rasio Kas menunjukkan tren penurunan yang bahwa penggunaan aset lancar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin baik untuk melunasi kewajiban lancarnya, artinya alokasi aset lancar untuk pelayanan sudah baik sehingga pada akhir tahun pembukuan tidak menjadi *idle* bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rasio Cepat dan Rasio Lancar mengalami peningkatan pada tahun 2019, nilai rasio ini masih cukup tinggi yang berarti bahwa

masih banyak aset lancar yang mengendap (*idle*) hal ini disebabkan pertumbuhan aset lancar pada tahun tersebut. Rasio Cepat dan Rasio Lancar pada tahun 2020 menunjukkan tren penurunan. Tren penurunan dari Rasio Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan



bahwa aset lancar telah digunakan semakin optimal untuk memenuhi kewajiban lancarnya (Maizunati, 2017). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun Setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo tepat pada waktunya.

b. Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan secara keuangan daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gambar 3. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

Sumber: data diolah, 2022

Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 0,56, kemudian meningkat menjadi 0,58 pada tahun 2019, dan turun menjadi 0,54 pada tahun 2020, artinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki rasio



Kemandirian Keuangan yang lemah dalam mengoptimalkan PAD. Secara komposisi, PAD Provinsi Jawa Tengah terhadap Total Pendapatan setiap tahun menunjukkan pemerintah masih membutuhkan sumber pendapatan diluar daerah untuk melaksanakan kegiatan belanja daerah. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mengoptimalkan geliat aktivitas ekonomi dari sektor-sektor potensial yang dimiliki.

c. Fleksibilitas Keuangan

Pada dimensi fleksibilitas tingkat layanan dengan menggunakan rasio fleksibilitas keuangan munjukkan bahwa tingkat fleksibilitas keuangan dalam operasional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah angka 1.

Gambar 4. Rasio Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

Sumber: data diolah, 2022

Fleksibilitas keuangan menunjukkan kelenturan keuangan berupa sumber daya bebas yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada hasil analisis rasio fleksibilitas keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020 memiliki angka di bawah 1 yang artinya pemerintah memiliki dimensi kemandirian keuangan yang lemah yaitu tidak memiliki sumber daya yang bebas untuk meningkatkan pelayanan. Tren penurunan terjadi selama tahun 2018-2020 disebabkan oleh komposisi Total Pendapatan yang meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp 26.740.296.197.300 dan 2019 sebesar Rp 15.702.411.154.886 juga mengalami peningkatan pada komposisi Belanja Operasi pada tahun 2018 sebesar Rp 15.702.411.154.886 dan 2019 sebesar Rp 16.354.554.423.473. Pada tahun 2020 kondisi Fleksibilitas Keuangan juga mengalami penurunan dengan komposisi Total Pendapatan Rp 22.857.781.266.070 dan Belanja Operasi sebesar Rp 16.223.988.285.131. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan pendapatan dari mengoptimalkan sumber pendanaan baru untuk belanja operasi daerah.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rasio solvabilitas jangka pendek yang baik karena telah dioptimalkan untuk pelayanan publik, hal ini dapat dibuktikan dengan tren penurunan pada Rasio Kas, Rasio Cepat dan Rasio Lancar.
2. Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai Rasio Kemandirian Keuangan yang lemah dalam

mengembangkan kreatifitas dan eksplorasi sumber-sumber pendanaan di daerahnya.

3. Kondisi keuangan yang diukur dengan menggunakan Rasio Fleksibilitas Keuangan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki sumber daya bebas (*free resources*) untuk meningkatkan pelayanannya.

5.2. Saran

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan optimalisasi dalam mengeksplorasi sumber pendapatan baru di daerahnya untuk meningkatkan kemandirian daerah dan perlu memperhatikan keseimbangan pertumbuhan total pendapatan dan belanja operasional agar terkendali untuk memiliki sumber daya bebas dalam menghadapi kejadian luar biasa.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya menggunakan 5 rasio keuangan dari total 15 rasio keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014), sehingga kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum tergambarkan secara menyeluruh dari setiap dimensi basis pendapatan, stuktur utang dan fleksibilitas tingkat layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erniati. (2019, September 6). *Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*. Retrieved from Kanwil DpJb Prov.Sulteng: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-seagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>
- Hendrick, R. 2004. Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Governments: Focus on Chicago Suburban Municipalities. *Urban Affairs Review*. Vol. 40. No. 1. pp. 78- 114.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 409.
- Pengelolaan Keuangan Negara*. Retrieved from Kanwil DpJb Prov.Sulteng: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-seagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>
- Suhartanto. (2013, May 28). *Efektivitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Manajemen Pemerintah Daerah*. Retrieved from Pusdiklatwas: https://pusdiklatwas.bkp.go.id/asset/files/post/20130528_163218/Efektivitas%20LKPD%20Pengambilan%20Keputusan.docx
- Keuangan pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota di Jawa-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 139-162.
- Mohammad Mahsun (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Muth, M., & Donaldson, L. (1998). Stewardship Theory and Board Structure: a contingency approach. *EconPapers*, 5-28
- Ritonga, I.T., Clark, C., Wickremashinghe, G. 2012. Developing a Measure of Local Government Financial Condition. *The 13th International Annual Conference Asian Academic Accounting Association*. Kyoto, Jepang, 9-12 November 2012.
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure Of Local Government's Financial Conditions. *Journal of Indonesian Economy and Business* , 142-164.
- Zafra-Gómez, J.L., López-Hernández, A.M., Hernández-Bastida, A. 2009. Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government. *The American Review of Public Administration*. Vol. 39. No. 4. pp. 425-449.